

## ***Rihlah: Syar'iyah atau Syaithâniyyah***

Oleh: Muhsin Hariyanto

**Rihlah**, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "piknik" atau "tour" dalam bahasa Inggris, yang sebenarnya adalah perbuatan yang 'mubah' (boleh dikerjakan), saat ini – tiba-tiba -- menjadi perbincangan yang menarik di antara sahabat-sahabat penulis. Kenapa? Karena 'piknik-piknik' itu kini telah menjadi komoditas baru dan bahkan menjadi sarana perbuatan yang tak pantas untuk dikakukan oleh siapa pun yang masih mengedepankan nuraninya.

Penulis, yang beberapa saat pernah belajar *Ushûl al-Fiqh* dan Teori *Maqâshihd asy-Syarî'ah*, memahami keresahan para sahabat penulis itu. Sesuatu yang semula berkategori 'mubah' bisa jadi berubah hukumnya – misalnya – haram atau makruh, dan bisa jadi berubah menjadi sunnah atau wajib, bergantung pada 'illah (*causa-legis*, sebab hukum yang melatarbelakanginya) dan *maqshad* (tujuannya)-nya. 'Piknik' (*rihlah*) yang semula berkategori 'mubah' "kini" ditengarai bisa berubah menjadi sesuatu yang pantas **diharamkan**, atau paling tidak **dimakruhkan**, karena ada sinyal-sinyal yang menandakan adanya ketidak-manfaatan dan kemadharatan yang bisa bermuara pada sesuatu yang haram, baik dalam bentuk manipulasi-manipulasi simbolik, dampak-dampak negatif yang bisa diperhitungkan, maupun niat-niat tak terpuji yang ada di balik simbol-simbol mulia '*rihlah syar'iyah*' (piknik yang – pada dasarnya -- diharamkan).

Kasus pak Surono, misalnya (bukan nama sebenarnya). "Dia" adalah orang yang paling suka 'piknik'. Apalagi piknik yang diselenggarakan oleh kantornya dengan menggunakan uang kantornya. Dia – dan boleh jadi isteri dan anak-anaknya – nampaknya tidak peduli apakah piknik yang diikutinya itu cukup proporsional, dalam arti benar-benar penting selaras dengan kepentingan kantornya atgau tidak. Yang penting bagi dirinya – dan mungkin juga (bagi) isteri dan anaknya – "menyenangkan" dan boleh jadi "memuaskan "ego"-nya.

Dia tidak mau dipusingkan oleh kritik teman-teman sejawatnya yang selalu mengingatkan agar bisa mengalahkan 'ego'-nya untuk bersikap lebih arif, yang dalam istilah sahabat-sahabat dekatnya "mempertimbangkan mashlahat dan madharatnya". Bukankah ulama ushul fiqih sudah pernah memperkenalkan sebuah kaedah: "*al-mashâlihul 'âmmah muqaddamah 'an al-al-mashâlihul khâshshah*" (kepentingan publik harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi); dan "*dar-ul mafâsid muqaddam'an jalbil mashâlih*" (mencegah terjadinya kerusakan harus diprioritaskan daripada memperoleh kemanfaatan).

Nampaknya, dia – dan mungkin juga anak-isterinya – sudah sebegitu cinta terhadap budaya 'piknik', dan bahkan mengemasnya dengan beberapa istilah yang diharapkan bisa mencitrakan kebaikannya, seperti: "*rihlah 'ilmiyah*" (*study tour*), *rihlah ta'âwuniyyah* (*cooperative tour*), yang dikesankan baik dan dikemas dengan beberapa kemasan kosmetikal lainnya. Dan bahkan jargon 'silaturrahim' disertakan untuknya, misalnya dengan

menuliskan tema acara 'piknik' kantornya pada spanduk panjang dan indah --  
- pada bulan |Syawal" -- dengan rangkaian kata: "*Kita sukseskan safari syawal kita dengan semangat ukhuwwah*" ". "Luar Biasa!"

Teman-teman penulis yang – sedikit-banyak -- tahu maksudnya hanya bisa bergumam " sekarang ini hal-hal yang bersifat pantas atau tidak pantas sangatlah dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang terbangun, di antaranya efektif terbentuk melalui pembiasaan yang berkelanjutan. Sampai-sampai muncul jargon baru, sebagai ungkapan pejoratif : "**benarkan yang biasa, dan jangan biasakan yang benar**", untuk menggantikan jargon yang seharusnya disosialisasikan secara berkelanjutan: "**Biasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa**".

Penulis khawatir, lebih jauh (kalau dibiarkan tanpa kontrol) pembiasaan yang (sebenarnya) salah ini akan berimplikasi negatif pada perubahan tatanan masyarakat kita, walaupun saat ini proses anomali kehidupan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dengan berbagai variannya telah berlangsung dan mendapatkan pembenaran publik, karena mereka berkepentingan untuk membudayakannya.

Implikasi negatif di antaranya terbentuk melalui proses imitasi, di mana ada upaya masyarakat mendekati pada ciri yang menjadi *trend* di masyarakat. Terlebih lagi apabila hal tersebut dapat meningkatkan status sosial, mengandung nilai lebih pada diri seseorang, serta menyebabkan diterimanya pada komunitas tertentu.

Keberhasilan "*key persons*" (orang-orang yang berpengaruh) dalam memerankan diri sebagai sosok 'pahlawan' bagi komunitas yang sudah terpengaruh oleh budaya 'hedonis' tidak hanya menyukseskan karya penting yang dibawakannya. Namun, juga membesarkan pamornya, yang pada berimplikasi pada ketenaran dan perolehan kue-kue kenikmatan duniawi di lingkungan kantornya, dan bahkan di dalam komunitas yang bersahabat dengannya. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong para aktor pecinta kenikmatan 'piknik' ini untuk terus berperan untuk mengeksploitasi perannya sebagai '*broker*' pengurus duit kantor demi kepentingan-kepentingan pribadi dan para kroninya, dengan mengabaikan dampak (negatif) sosialnya, termasuk dampak (negatif) bagi kantornya, yang dengan perilakunya tergerogoti pilat-pilar penyangganya.

Kita dapat melihat betapa rapuhnya masyarakat kita ketika menghadapi budaya 'piknik', yang dalam skala tertentu bisa diterjemahkan ke dalam budaya '*mudik*'. Mereka lebih banyak yang menyerah dan ikut menikmati, dan disisi lain ada sekelompok yang justeru lari dari masalah, dan bukan – dengan gagah berani -- berusaha menghadapi masalah. Sehingga, tidaklah mengherankan jika angka aktivitas 'piknik' yang tidak etis itu -- di masyarakat kita -- semakin meningkat pesat dengan berbagai variasi kasus manipulasinya.

Lebih tragis lagi, kita juga sering disuguhi tontonan 'para badut politik' bangsa ini, yang sangat pandai bersilat lidah, dengan mengatasnamakan "*studi banding*" yang secara kasat mata nyata-nyata telah mereka lakukan sebagai

'piknik-piknik' yang sarat dengan kepentingan pribadi. Kita pun sering melihat betapa lihai para pembela orang-orang 'salah' ini dengan berbagai caranya mereka membuat kebijakan yang berakibat pada kesengsaraan rakyat, menyelenggarakan kegiatan 'piknik' berjamaah atas nama kepentingan rakyat, padahal substansinya adalah "melancong" untuk kesenangan pribadi, keluarga dan para kroninya.

Lebih ironis lagi, berbagai sikap tidak bertanggung jawab yang diperlihatkan para pemimpin bangsa ini yang pada hakikatnya adalah "produk" dari mentalitas 'korup' yang melekat pada diri mereka. Setali-tiga uang, tidak berbeda substansinya dengan peran 'broker' yang dimainkan oleh pak Surono pada setiap acara 'piknik-kantoran' tingkat lokal di dalam komunitas kecilnya, yang pada akhirnya berujung pada "ketebalan" saku dan dompetnya. Para pemimpin kita, telah banyak bermain akrobat untuk mengisi pundi-pundi mereka. Dengan acara 'studi banding' atas nama rakyat yang tak pernah berimplikasi positif bagi rakyat, kecuali untuk para keluarga dan kroni mereka.

Untuk itu, masyarakat yang masih memiliki nurani perlu berani untuk bersikap tegas "berteriak – dengan kata – tidak" kepada mereka, sebagai peringatan dini bagi para pelakunya dan *shock therapy* bagi mereka yang (akan) melakukannya.

Siapa lagi yang harus melakukan kontrol sosial atas mereka (para pecinta 'piknik' *haram* – *rihlah syaithāniyyah* – yang bernuansa 'korup' itu), kalau bukan "kita", sejumlah orang yang masih mengedepankan nurani. Dan dengan lantang harus kita katakan: "Hai para pelaku piknik '*haram*' (atau minimal '*makruh*'), jadilah "para pelaku piknik (halal) yang bermartabat. Silakan berpiknik dengan cara-cara 'etis' yang tak berseberangan dan melanggar prinsip-prinsip syari'at, dengan serangkaian aktivitas 'piknik; *halal* yang bernama "*rihlah syar'iyah*", serangkaian kegiatan 'piknik' yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, yang seharusnya dilakukan bukan dengan pola "*israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan)". Dan tak terkecuali bagi para pemudik: "Hindarkan diri kita dari jebakan *konsumerisme* dalam tradisi 'piknik' (yang bisa berakibat memiskinkan diri dan banyak orang) yang kini tengah menjadi bagian dari budaya (sebagian) masyarakat kita".

Penulis adalah Dosen Tetap FAI UM Yogyakarta dan Dosen Tidak Tetap STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.

(Sumber: *Suara Muhammadiyah*. Tulisan ini pernah dipublikasikan di Majalah Suara Muhammadiyah)